

Pengelolaan Alam Wonogiri pada Paruh Pertama Abad XX

Dennys Pradita

Dosen

Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Dennyspradita@unja.ac.id

Hanif Risa Mustafa

Dosen

Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Jambi
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia

Hanifmustafa@unja.ac.id

Received: July, 19 2024; Revised: October, 7 2024; Accepted: October, 7 2024

Abstract

Wonogiri in colonial period was part of the Mangkunegaran region. This research will discuss the early description of forests and nature in Wonogiri, the exploitation of nature and its impact on the environment and socio-economy. This study is a comparative study of the exploitation carried out by the colonial government and the area controlled by the Javanese king. The purpose of this study is to look at the process of change in Wonogiri's environment and socio-economy. This research uses the historical method. The sources used were mostly newspaper reports which were then compared with other reports and journal articles. Sources that have been obtained are then tested for authenticity and content suitability. The next stage is to interpret the data and writings with a multidisciplinary approach. The exploitation of nature in Wonogiri is basically divided into two, the first is to take direct results such as teak forests, and the second way is to convert forest land into plantations. On the other hand, the exploitation of nature in Wonogiri also has an impact on environmental damage. In the form of floods, landslides and wild animals that have lost their food chain, causing conflicts with humans. With the impact of forest exploitation comes the awareness to restrain excessive forest exploitation.

Keywords: *Environment, nature, socio-economy, Wonogiri.*

Abstrak

Wonogiri pada masa kolonial merupakan bagian dari wilayah Mangkunegaran. Tulisan ini akan membahas mengenai gambaran awal hutan dan alam di Wonogiri, eksploitasi alam hingga dampaknya pada lingkungan, dan sosio-ekonomi. Kajian ini menjadi kajian pembandingan dari eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan daerah yang dikuasi raja Jawa. Tujuan pada penelitian ini melihat proses perubahan lingkungan Wonogiri dan sosio-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Sumber yang digunakan sebagian besar dari laporan surat kabar yang kemudian dikomparasikan dengan laporan lainnya serta artikel jurnal. Sumber yang telah didapatkan kemudian dilakukan uji keaslian dan kesesuaian isi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penafsiran dari data dan menulis dengan pendekatan multidisiplin. Eksploitasi alam di Wonogiri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yang pertama adalah diambil langsung hasilnya seperti hutan jati, serta cara yang kedua adalah mengubah lahan hutan menjadi perkebunan. Di sisi lain eksploitasi alam di Wonogiri juga memberi dampak kerusakan lingkungan. Berupa banjir, tanah longsor hingga hewan liar yang kehilangan rantai makanan sehingga menyebabkan konflik dengan manusia. Adanya dampak dari eksploitasi hutan muncul kesadaran untuk menahan eksploitasi hutan berlebihan.

Kata Kunci: Alam, lingkungan, sosio-ekonomi, Wonogiri.

Copyright © 2024 by Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, Published by Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. This is an open access article under the CC BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Wilayah Wonogiri terletak di bagian selatan dari Puro Mangkunegaran. Wilayah ini awalnya terdiri dari dua kawedanan, yaitu Baturetno dan Wonogiri. Pada tahun 1891 Kawedanan Baturetno digabung ke kawedanan Wonogiri. Selanjutnya, kawedanan Wonogiri statusnya diubah menjadi Kabupaten. Bupati Wonogiri kemudian berada di bawah langsung dari pemerintahan Mangkunegaran. (Sriyono, 2006, hal. 19–21)

Dilihat dari penamaan wilayahnya, Wonogiri memiliki makna sebagai hutan dan gunung. Hal ini berdasarkan dari arti nama Wonogiri yang terdiri dari dua suku kata, yakni *wono* berarti hutan, dan *giri* berarti gunung. Adanya penamaan yang memiliki makna hutan dan gunung ini maka tidak mengherankan jika pada akhir abad XIX kawasan ini banyak berupa hutan alam dan juga sebagian berupa pegunungan. Wilayah pegunungan Wonogiri berada di bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara berada di kaki gunung Lawu dan bagian selatan berupa kawasan pegunungan kapur selatan.

Wonogiri merupakan bagian dari wilayah *vorstenlanden*, meski demikian sampai akhir Abad XIX Wonogiri tidak banyak menunjukkan kemajuan ekonomi ataupun politik layaknya wilayah *vorstenlanden* lainnya. Secara ekonomi dan politik, Wonogiri masih menggantungkan diri pada pemerintahan Mangkunegaran. Kawasan Wonogiri baru menampakkan potensi ekonominya, pasca usaha Mangkunegaran membuka hutan Wonogiri sebagai wilayah perkebunan. Wilayah perkebunan di Wonogiri telah mengubah citra Wonogiri sebagai wilayah terbelakang menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan dalam segi ekonomi.

Beberapa kajian terdahulu tentang ekonomi dan hutan atau perkebunan di Wonogiri telah ada. Kajian pertama dari Wasino dan Margana. Kedua tulisan ini banyak mengkaji usaha Mangkunegoro memanfaatkan lahan untuk perkebunan kopi dan tebu. (Margana, 1997; Wasino, 2005) Kajian pertama dari Witari. Kajian ini melihat relasi antara mitos dengan kebijakan pengelolaan hutan yang mengarah pada eksploitasi yang dilakukan oleh pihak Mangkunegaran. Salah satu kawasan hutan yang dikaji dalam artikel ini adalah hutan di Wonogiri. Namun demikian, kajian dari Witasari banyak berfokus pada kajian mitos pengelolaan hutan di Wonogiri. (Witasari et al., 2023) Tulisan dari Witasari selanjutnya juga membahas mengenai pengelolaan hutan di wilayah Praja Mangkunegaran dalam perspektif barat dan timur. Selain itu pada kajian ini belum banyak menyinggung mengenai dampak dari eksploitasi hutan di Wonogiri. (Witasari, 2017) Kajian selanjutnya dari Pradita, et. al. Tulisan dari Pradita, et.al. menyinggung mengenai perubahan hutan menjadi perkebunan. (Pradita et al., 2021) Kajian tersebut kemudian dipertajam pada tulisan

selanjutnya yang melihat mengenai perubahan lanskap di salah satu wilayah Wonogiri. Perubahan lanskap terjadi dari hutan menuju perkebunan hingga pertanian. (Pradita & Wardhana, 2023)

Beberapa kajian di atas banyak berfokus mengenai adanya proses perubahan hutan menjadi perkebunan. Kajian di atas, mengenai perkebunan dan hutan di Wonogiri banyak dilihat dari sisi positif dari ekspansi ekonomi. Kajian pada artikel ini akan berfokus mengenai proses eksploitasi hutan terhadap lingkungan, terutama yang dirasakan oleh masyarakat di Wonogiri pada awal abad XX sampai pertengahan abad XX. Perubahan alam Wonogiri pada periode ini cukup pesat, namun perubahan alam di Wonogiri juga memberi dampak adanya bencana alam hingga kerusakan ekosistem.

Mengubah citra hutan menjadi wilayah perkebunan merupakan bagian upaya dalam meningkatkan perekonomian. Namun eksploitasi hutan secara berlebihan tanpa memperhatikan keseimbangan ekologi akan berdampak besar terhadap perubahan lingkungan. Sebagaimana gagasan Worster, bahwa lahan hutan bisa menghasilkan kekayaan. Namun apabila pemanfaatan lahan hutan dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan ekologi yang cepat dan mudah. (Worster, 1993, hal. 108). Dampaknya akan berakibat pada bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor.

Penelitian ini bertujuan melihat proses deforestasi di wilayah Wonogiri, termasuk mengungkap dampak dari perubahan citra hutan ke tujuan ekonomis. Apakah perubahan citra hutan ke tujuan ekonomis memberi dampak kerusakan lingkungan atau sebaliknya memberikan nilai tambah pada masyarakat. Perubahan cara pandang hutan ke tujuan ekonomis dan proses deforestasi ini tidak bisa dilihat secara sederhana, sebaliknya gejala perubahan ini perlu dilihat secara kompleks. Sartono menegaskan dalam cara pandang sejarah terdapat hubungan antara sebab dan akibat, namun hubungan ini tidak bisa dilihat secara sederhana. Ada gejala multikausalitas karena menyangkut tindakan yang berhubungan dengan motivasi maupun kebijakan. (Kartodirjo, 2017, hal. 95) Kebijakan pemerintah Makunegaran sendiri berusaha mengubah hutan Wonogiri menjadi lahan perkebunan untuk memberikan nilai ekonomi lebih terhadap masyarakat dan kemajuan praja Mangkunegaran. Lebih lanjut kajian ini menjadi kajian perbandingan mengenai pengelolaan hutan oleh pemerintah kolonial langsung. Pengelolaan hutan oleh pemerintah kolonial disoroti sebagai sebuah eksploitasi terhadap potensi hutan di Jawa sebagai sebuah potensi ekonomi. “pengelolaan hutan” oleh pemerintah kolonial diturunkan dalam aturan *Boschordonnatie voor Java en Madoera*. Pada aturan ini semakin jelas dominasi pemerintah kolonial dalam mengeksploitasi hutan, terutama hutan jati di Jawa. (Sari & Agung, 2023, hal. 349–350; Wardo, 2017, hal. 188–190) Wonogiri berada dibawah kekuasaan raja lokal, namun pada kenyataan eksploitasi terhadap hutan juga hampir sama seperti yang berada di bawah pemerintah kolonial.

2. Metode

Penelitian mengenai hutan di Wonogiri hingga dampaknya pada lingkungan pada paruh pertama abad XX ini dikaji dengan menggunakan metode sejarah. Tahap pertama yang dilakukan adalah pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan dalam mengkaji ini berasal dari surat kabar pada masa kolonial, khususnya

yang memberitakan tentang hutan di Wonogiri. Surat kabar ini sebagian besar diakses melalui *delpher.nl*. Sumber surat kabar tersebut juga disandingkan dengan sumber lain yang berupa laporan, aturan-aturan pemerintah kolonial serta kajian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan. Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, interpretasi dan penulisan. (Carr, 2014, hal. 5–7) Pada penelitian ini, kritik sumber digunakan sebagai bentuk validasi, apakah sumber yang digunakan kredibel atau sebaliknya menyesatkan. Setelah mendapati sumber yang kredibel melalui proses kritik sumber, dilakukan proses interpretasi. Proses interpretasi dilakukan untuk menerjemahkan maksud dari sumber. Hal ini dilakukan mengingat sumber yang digunakan sebagian besar adalah sumber kolonial dengan bahasa sumber Belanda. Hasil interpretasi sumber, dilanjutkan dengan penulisan sejarah. Penulisan artikel ini menggunakan genre sejarah lingkungan. Fokus kajian ini pada relasi antara manusia dengan alam di Wonogiri. Alam bukan lagi pelengkap kehidupan yang perlu dilestarikan, namun telah mengalami perubahan cara pandang yang lebih ekonomis. Sebagaimana gagasan Donald Hughes, manusia melakukan eksploitasi dan mengubah hutan menjadi perkebunan untuk tujuan ekonomi dibanding menjaga keseimbangannya. (J. Donald Hughes, 2016; McNeill, 2003, hal. 6) Alhasil perubahan hutan menjadi perkebunan akan berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sekilas Alam di Wonogiri

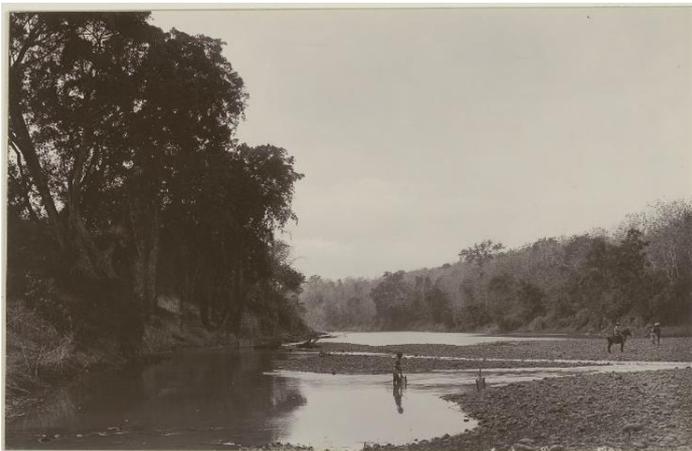
Lanskap alam Wonogiri pada umumnya seperti dua sisi mata uang. Pada satu sisi merupakan kawasan yang subur, sedangkan pada sisi lain cenderung berupa pegunungan kapur yang tandus. Perbedaan bentang alam Wonogiri lainya juga nampak dari kontur yang berbeda beda. Wonogiri pada beberapa titik merupakan dataran tinggi atau lereng gunung Lawu, dan ada juga yang berupa kawasan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan pantai. (Pradita et al., 2021, hal. 3–4)

Wonogiri pada musim kemarau digambarkan sebagai kawasan penunangan coklat tanpa pepohonan dan tandus, pada bagian selatan pegunungan kapur putih yang berdebu. Tumbuhan diibaratkan sebagai tanaman mati yang hanya dapat hidup ketika tersiram air hujan. (Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 1938; Het nieuws van den dag voor Naderlandsch Indie, 1939) Hal ini menandakan jika kawasan Wonogiri merupakan kawasan yang kekurangan air dan hanya dapat hijau ketika musim hujan tiba. (Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 1938)



Gambar 1. Pegunungan Kapur di Wonogiri Selatan (Sumber: Koleksi Universiteit Leiden)

Laporan mengenai kondisi alam Wonogiri bagian selatan juga diperkuat dari foto koleksi Universiteit Leiden. (Omgeving van Pratiwijantoro bij Wonogiri, 1941) Alam Wonogiri selatan lebih banyak ditumbuhi pohon tahunan ataupun tanaman yang membutuhkan sedikit air untuk hidup. Tanaman tahunan seperti jati banyak ditemui di Wonogiri. Salah satu karakteristik dari tanaman ini adalah meranggas atau menggugurkan daun ketika musim kemarau. Hal inilah yang menyebabkan gambaran alam Wonogiri selatan begitu gersang dan digambarkan seperti tidak ada tanaman, jikalau ada cuma seperti tanaman mati. Pada foto tersebut juga menunjukkan kondisi pegunungan yang seperti ditumbuhi tanaman yang meranggas.



Gambar 2. Sungai dan Hutan di Wonogiri Tahun 1915 (Sumber: Koleksi Univeristeit Leiden)

Kondisi yang cenderung berbeda terlihat pada Wonogiri tengah menuju ke utara. Pada foto di atas menunjukkan lokasi yang cenderung lebih subur dan banyak tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan besar nampak hijau di sekitar sungai tersebut. Kondisi tersebut jelas nampak berbeda dengan kondisi di selatan yang cenderung tandus. Pada keterangan foto disebutkan jika lokasi pengambilan foto ini berada di Wonogiri bagian tengah. (Rivier bij Wonogiri, Midden-Java, 1915)

3.2. Hutan dan Ekonomi

Pembukaan lahan pada kawasan hutan di wilayah Mangkunegaran dilakukan dengan alasan pemajuan ekonomi. Hutan sudah tidak lagi disakralkan, namun terjadi perubahan cara pandang terhadap hutan. Hutan sudah dipandang sebagai salah satu alat untuk menumpuk pundi-pundi keuangan negara. (Witasari et al., 2023, hal. 160)

Hasil hutan dan juga lahan hutan di Wonogiri merupakan salah satu penopang pendapatan yang besar dalam ekonomi di wilayah ini. Wilayah Wonogiri secara umum yang masih berupa hutan masih menyimpan potensi hasil hutan serta tidak ditemukan hasil untuk diekstraksi menjadi komoditas perekonomian lainnya menyebabkan hutan di Wonogiri menjadi lahan yang menggiurkan untuk diolah.

Hutan yang sebelumnya tidak tersentuh secara ekonomi kemudian diubah menjadi kawasan yang menghasilkan pundi-pundi. Kebijakan alih fungsi hutan dan juga lahan pertanian di Wonogiri sudah dimulai dari masa Mangkunegoro IV. Pihak Mangkunegoro mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan perkebunan kopi dan tebu. (Witasari, 2017, hal. 86–87) Guna mempercepat kemajuan perekonomiannya, Mangkunegara IV berupaya membuka kawasan pegunungan menjadi kawasan perkebunan. Perkebunan ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan ekspor. (Birsyada et al., 2016a, 2016b, hal. 182)

Dilihat ke belakang, pengelolaan lahan di wilayah Mangkunegaran adalah di bawah pihak raja. Raja berhak atas tanah yang dikuasainya. Namun demikian, pada beberapa bagian terdapat tanah yang diberikan kepengelolaannya kepada pada bangsawan dan kerabat. Tanah yang dikelola oleh bangsawan diusahakan untuk pertanian pangan. Tetapi pada perjalanannya banyak tanah tersebut yang disewakan kepada pengusaha swasta. Melihat minimnya potensi ekonomi yang didapatkan, maka Mangkunegoro IV menarik tanah yang disewakan tersebut. Tanah tersebut kemudian diubah menjadi perkebunan raja. Selain itu perkebunan dengan cara membuka lahan hutan juga semakin berkembang di wilayah Mangkunegaran, termasuk Wonogiri.

Sebelum Abad XX, hutan Wonogiri sebenarnya juga sudah mulai banyak yang beralih fungsi menjadi perkebunan kopi. Salah satu lokasi yang disebutkan terjadi alih fungsi hutan menjadi perkebunan kopi adalah di wilayah Manggis dan Asinan. Kebijakan ini terjadi pada masa Mangkunegoro IV. (Margana, 1997, hal. 87)

Kembali pada masalah alih fungsi hutan pada Abad XX, eksploitasi hutan bukan hanya terjadi pada Kawasan-kawasan yang bisa diolah menjadi kawasan perkebunan. Salah satu potensi hutan yang kemudian dilirik oleh pihak Mangkunegaran sebagai sumber penghasilan adalah hutan jati. Hutan jati banyak tumbuh di wilayah Wonogiri. Jati merupakan satu jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di Wonogiri. Tanaman ini banyak digunakan sebagai tanaman pembatas lahan warga. Selain fungsi tersebut, tanaman jati pada perkembangannya memiliki nilai ekonomi. Jati dianggap sebagai salah satu tumbuhan keras yang bermutu tinggi. (Witasari et al., 2023, hal. 159–160)

Hutan Jati di Wonogiri berusaha dilakukan eksploitasi dan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan kerajaan, namun belum terdapat pemetaan wilayah hutan jati yang bagus, sehingga perlu

membutuhkan kajian lanjutan karena jika dilakukan eksploitasi tanpa kajian akan menyebabkan kawasan Wonogiri semakin terlihat tandus. Lebih lanjut, kawasan hutan jati berada di kawasan perbukitan yang curam dan dikhawatirkan akan menyebabkan longsor. Hutan jati di Wonogiri memiliki luas 4.000 ha di luar hutan lindung. (De Locomotief, 1918)

Kajian lanjutan mengenai potensi hutan jati di Wonogiri menunjukkan angka yang lebih besar lagi. Kawasan hutan jati di Wonogiri juga tersebar pada beberapa wilayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: Tanah sewa di Wonogiri 3.519 ha, hutan jati 5.897 ha, hutan kayu liar 12.816 ha, tanah tidak berpenghuni 2.634 ha. (Batavia) & Nederlands-Indië, n.d., hal. 5) Eksploitasi hutan jati di Wonogiri bukan hanya dilakukan secara legal atau melalui konsensi, namun juga dilakukan secara ilegal. Masyarakat juga melakukan pembalakan liar pada hutan jati. Pembalakan liar terjadi di hutan jati Gunung Gedeh, Giriwoyo. Diperkirakan komplotan ini berjumlah lima ratusan orang. (Java-bode : nieuws, 1951)

Potensi alam di Wonogiri bukan hanya berupa jati dan lahan perkebunan. Di Wonogiri sebenarnya memiliki potensi alam lain yang bernilai tinggi. Alam Wonogiri menyimpan kandungan granit yang sudah dilakukan penambangan secara tradisional oleh masyarakat. Granit dari Wonogiri di jual ke Sragen. (De locomotief, 1938)

Adanya eksplorasi hutan, baik untuk perkebunan dan juga eksploitasi jati di Wonogiri ternyata dampak ekonomi tidak dirasakan oleh masyarakat. Hal ini Nampak dari masih tingginya angka kemiskinan di Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berencana menanggulangi kemiskinan dengan budidaya cengkeh. Tanaman cengkeh muda dijual secara murah oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat Wonogiri. (Surakarta *Kruidnagel-aanplant in Wonogiri*, 1953) Tanaman cengkeh yang akan ditanam di Wonogiri didatangkan dari Kebumen sejumlah 15.000 batang dan 2.000 batang diimpor oleh departemen pertanian. (De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 1953)

Meskipun lahan pertanian, hutan dan pekarangan yang dikelola oleh masyarakat masih cukup luas. Namun hasil yang didapatkan tidak bisa membawa masyarakat Wonogiri pada tingkatan ekonomi yang lebih baik. Adapun hasil pertanian dan hutan yang dikelola oleh masyarakat seperti: bengouk, pisang, minyak kacang tanah, bungkil kacang tanah, bambu, biji djamboemété, mangga, nanas, umbi singkong, jagung, arang dan djarakkepar, kapuk dan gaplek. (De Locomotief, 1939a)

Eksploitasi hutan dan lahan di Wonogiri telah membawa kemajuan ekonomi bagi kerajaan. Namun demikian, hasil dari wilayah Wonogiri tersebut tidak kembali pada masyarakat atau tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat Wonogiri masih berada di bawah garis kemiskinan yang terus dirasakan sampai periode 1950-an.

3.3. Dampak Eksploitasi Hutan di Wonogiri Terhadap Lingkungan

Eksploitasi lahan hutan di Wonogiri ditargetkan akan memberikan dampak ekonomi, namun dampak ekonomi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Eksploitasi lahan atau hutan di Wonogiri justru berdampak buruk pada lingkungan. Terdapat beberapa areal yang dianggap kritis. Areal yang menjadi

lahan kritis tersebut kemudian berubah menjadi lahan bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Hal ini terjadi karena tidak ada hutan atau pohon yang mampu menyerap air atau menjadi benteng dari erosi.

Akibat dari pengelolaan alam Wonogiri yang hanya mengacu pada peningkatan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan alam, maka di Wilayah Wonogiri terjadi beberapa kali bencana alam. Bencana alam di Wonogiri yang pernah dilaporkan seperti banjir dan tanah longsor. Laporan pertama mengenai banjir di Wonogiri pada awal Abad XX terjadi pada 1914. Banjir setinggi 40 cm merendam wilayah Wonogiri yang menyebabkan penduduk naik ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. (Nieuwe Tilbursche courant, 1914) Pada laporan ini tidak disebutkan lokasi mana saja yang terdampak dari banjir.

Wilayah Tirtomoyo yang dialiri sungai Wiroko juga tidak bisa lepas dari bencana banjir. Banjir di wilayah ini dilaporkan sudah dua kali, yakni pada tahun 1935 dan 1937. Banjir pertama di aliran Sungai Wiroko setinggi satu meter. Banjir berikutnya di Sungai Wiroko kembali terjadi pada 1957 yang menenggelamkan sepuluh desa. (De Indische courant voor Nederland, 1957; Nederlandsch-Indië, 1935)

Banjir selanjutnya yang terjadi di beberapa wilayah di Wonogiri justru lebih besar. Banjir ini menenggelamkan beberapa ruas jalan yang menghubungkan Wonogiri dengan beberapa wilayah sekitarnya. Banjir yang terjadi pada Maret 1937 melumpuhkan jalur Wonogiri dan Ponorogo. Banjir menggenangi jalur antara Sukoharjo dan Wonogiri. Terjadi banjir di Wonogiri. Akibat banjir ini dilaporkan 14 orang hilang dan berdampak pada dua puluh sampai tiga puluh desa di Wonogiri. (Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch Indie, 1937; Guinea, 1961)

Dampak lain dari adanya eksploitasi alam di Wonogiri adalah tanah longsor. Laporan mengenai tanah longsor di Wonogiri terjadi pada 1928. Longsor yang terjadi di Bulukerto yang menyebabkan empat rumah terkubur. (De Locomotief, 1928) Longsor di Bulukerto ini dimungkinkan karena sudah mulai berkurangnya pohon besar yang berfungsi sebagai penahan di lereng bukit di wilayah tersebut.

Kerusakan lingkungan akibat ekspansi dan ambisi ekonomi kemudian dirasakan setengah abad kemudian. Hutan yang rusak di Wonogiri seluas 60.000 ha, namun pemerintah hanya berhasil melakukan reboisasi seluas 12.000 ha. Deforestasi di Wonogiri digambarkan seperti kawasan berbatu yang gundul dan tidak mampu menyerap air ketika hujan. Target kawasan hutan di Wonogiri sekitar 500.000 ha. Pemerintah menargetkan merampungkan sisa hutan selama sepuluh tahun. (Het nieuwsblad voor Sumatra, 1953)

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pihak kerajaan, harus dibayar oleh masyarakat pasca berakhirnya kekuasaan kerajaan. Tahun 1950-an ketika terjadi perpindahan kekuasaan ke pemerintah republik, pemerintah republik mendapat beban untuk mengembalikan hutan yang telah rusak. Namun demikian, pemerintah tidak mampu untuk melakukan perbaikan dalam waktu yang singkat karena terkendala masalah keuangan.

Perubahan fungsi hutan dan penggundulan yang terus terjadi dan pada satu sisi pemerintah cenderung kewalahan untuk melakukan reboisasi berdampak pada ekosistem di Wonogiri. Salah satu yang paling terdampak adalah satwa yang kesulitan mencari makan. Salah satu laporan yang menunjukkan adanya satwa liar mencari makan ke pemukiman adalah harimau.

Lokasi pertama yang ada laporan harimau masuk ke wilayah perkampungan ada di Tirtomoyo. Harimau yang datang ke perkampungan ini memangsa ternak warga. Pada laporan tersebut menyebutkan jika harimau tersebut memangsa pada malam hari. Laporan mengenai keberadaan harimau di Tirtomoyo bukan hanya memangsa ternak warga yang berupa ayam. Diduga harimau ini berasal dari satu harimau yang masuk ke pemukiman kemudian menerkam warga. Sehari kemudian, harimau tersebut ditembak mati. (Bataviaasch nieuwsblad, 1933; De Locomotief, 1933)

Di Tirtomoyo kembali ditemukan harimau yang berkeliaran di pemukiman warga. Harimau ini ditemukan lagi beberapa tahun setelah kematian harimau yang pertaman. Harimau ini berada di pemukiman warga Hargantoro, Kecamatan Tirtomoyo karena harimau ini turun ke permukiman warga, diduga harimau ini bertempat tinggal di Gua Paraggaruda. (Preangerbode, 1956)

Laporan mengenai serangan harimau ke pemukiman di Tirtomoyo tidak diketahui secara pasti jenisnya. Pada laporan tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai jenis harimau tersebut. Dimungkinkan untuk serangan yang pertamana antar macan kumbang jawa (*Panthera pardus melas*) ataupun harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*). Serangan harimau juga terjadi di wilayah lainnya. Kali ini ada di wilayah Slogohimo. Serangan macan kumbang (*Panthera pardus melas*) terjadi di Desa Semen, Slogohimo. Serangan ini mengakibatkan dua anak-anak mengalami luka-luka. (De nieuwe vorstenlanden, 1927)

3.4. Upaya Penyelamatan Hutan di Wonogiri

Dampak dari eksploitasi hutan di wilayah Wonogiri atau *vorstenlanden* pada umumnya akhirnya disadari oleh pihak penguasa. Mangkunegoro mengeluarkan kebijakan Pustaka Praja (Rijksblad) Mangkunegaran tahun 1920 nomor 22. Pada aturan ini disebutkan mengenai hak kepemilikan hutan, izin masuk hutan, penebangan, penanaman pohon. (Primaditya & Saraswati, 2022, hal. 5–6)

Aturan mengenai pemanfaatan hutan sebenarnya masih terdapat ambiguitas. Pada aturan tersebut dijelaskan jika penggunaan jati untuk keperluan kerajaan seperti pembangunan pesanggrahan, jembatan dan gudang masih dipermudah, sedangkan aturan penebangan jati di hutan untuk keperluan masyarakat seperti pembangunan rumah harus mendapat izin dari Wedono Gunung serta harus membayar sejumlah uang. (Witasari, 2017, hal. 87–88)

Setelah dikeluarkannya aturan oleh pihak Puro Mangkunegaran, juga mendesak Residen Surakarta untuk mengeluarkan aturan serupa. 13 Oktober 1923 Kepala Rumah Tangga Mangkuenagoro memberikan masukan kepada pihak Residen Surakarta untuk melakukan perlindungan hutan dari kebakaran, pencurian dan kerusakan.

Aksi nyata dilakukan oleh pihak Mangkunegaran untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pihak Mangkunegaran melakukan reboisasi hutan dari hulu sampai hilir. Tata Kelola lingkungan lainnya yang dilakukan oleh pihak Mangkunegaran adalah membangun saluran air di Temon, Wiroko, Kebon Agung, Keduang, Plumbon. (Witasari, 2017, hal. 86)

Kawasan Wonogiri merupakan kawasan yang sangat tandus dan terjadi deforestasi yang terus-menerus akibat desakan perkebunan kopi. Pada musim kemarau tanah di Wonogiri semakin kelihatan tandus. Pemerintah tidak mampu melakukan reboisasi karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan reboisasi sebesar f 60 per Ha. (De Nieuwe Vorstenlanden, 1923)

Hutan yang rusak di Wonogiri seluas 60.000 ha, namun pemerintah hanya berhasil melakukan reboisasi seluas 12.000 ha. Deforestasi di Wonogiri digambarkan seperti kawasan berbatu yang gundul dan tidak mampu menyerap air ketika hujan. Target kawasan hutan di Wonogiri sekitar 500.000 ha. Pemerintah menargetkan merampungkan sisa hutan selama sepuluh tahun. (Het nieuwsblad voor Sumatra, 1953) Masalah lingkungan, terutama udara di Wonogiri yang dihadiri oleh bupati dan camat. (De Locomotief, 1939b)

Kondisi alam Wonogiri yang tidak sepenuhnya subur ditambah dengan adanya eksploitasi hutan telah memperburuk kondisi alam Wonogiri. Hasil dari eksploitasi lahan dan hutan di Wonogiri ternyata tidak dikelola dengan baik atau tidak ada anggaran untuk memperbaiki Kembali. Kesadaran untuk memperbaiki lahan baru terjadi setelah adanya dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat, namun sayangnya biaya untuk perbaikan alam terlalu tinggi sehingga pemerintah kesulitan untuk mengembalikan alam Wonogiri.

4. Simpulan

Akhir Abad XIX sampai awal Abad XX menjadi awal pembukaan lahan hutan dan alih fungsi lahan hutan secara besar-besaran di Wonogiri. Pihak penguasa berupaya menaikkan status ekonominya dengan membuka perkebunan dan juga memberikan konsensi hutan jati. Kebijakan ini berhasil memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi keuangan penguasa. Tetapi yang didapatkan oleh penguasa tidak berbanding lurus dengan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari segi ekonomi. Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat justru mendapat dampak lingkungan yang cenderung negatif seperti banjir dan juga hewan buas masuk ke wilayah pemukiman masyarakat serta merusak kebun warga. Atas perihal tersebut, kebijakan Pustaka Praja (Rijksblad) Mangkunegaran tahun 1920 nomor 22 untuk menjaga keseimbangan alam Wonogiri mengalami kegagalan. Lebih lanjut, sistem pengelolaan hutan yang terjadi dibawah pemerintahan lokal tidak jauh berbeda dengan pengelolaan hutan yang berada di bawah penguasaan pemerintah kolonial yang melihat hutan dari sisi ekonomi saja.

Daftar Pustaka

(Batavia), D. van E. Z., & Nederlands-Indië, T. D. in. (n.d.). *Landbouwstatistiekkaart van Java en Madoera op schaal 1:150.000*.

Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië. (1938, Oktober 13). *Oase in Dorre Streek en een Historische Plaats, Door Weinigen Vermoed*.

Algemeen Handelsblad voor Nederlansch Indie. (1937, April 22). *Door Overstroming Overrom-Peld*.

- Bataviaasch nieuwsblad. (1933, Oktober 3). *EEN Tijger. Verbergt zich in een woning.*
- Birsyada, M. I., Wasino, Suyahmo, & Joebagio, H. (2016a). Bisnis Keluarga Mangkunegaran. *Walisongo: Jurnal Penelitian Keagamaan*, 24(1).
- Birsyada, M. I., Wasino, W., Suyahmo, & Joebagio, H. (2016b). Pemikiran Kewirausahaan Keluarga Mangkunegaran. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2).
<https://doi.org/10.15294/paramita.v26i2.6697>
- Carr, E. H. (2014). *Apa Itu Sejarah*. Komunitas Bambu.
- De Indische courant voor Nederland. (1957, April 17). *Overstromingen in Wonogirise.*
- De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad. (1953, Juli). *Kruitnagelen.*
- De locomotief. (1938, Oktober 13). *Midden -en Oost Java.*
- De Locomotief. (1918, Juli 22). *Nederlandsch-indie. De Bosschen in het Mangkoenegaransche Rijk.*
- De Locomotief. (1928, Maret 19). *Aardschuiving.*
- De Locomotief. (1933, September). *Tijger te Wonogiri.*
- De Locomotief. (1939a, Januari). *Uitvoer.*
- De Locomotief. (1939b, Januari 14). *Bescherming tegen luchtgevaar.*
- De nieuwe vorstenlanden. (1927, Juni 13). *Uit Wonogiri.*
- De Nieuwe Vorstenlanden. (1923, Januari 22). *Wonogiri.*
- Guinea, N. G. koerier : de groene : onafhankelijk dagblad voor N. N. (1961, Oktober 3). *Overstromingen op Midden-Java.*
- Het nieuwsblad voor Sumatra. (1953, Februari 18). *In Wonogiri.*
- Het nieuws van den dag voor Naderlandsch Indie. (1939, Oktober 15). *Naar Vallei der Cyclophen-Steenen Een Oase in een Dorre Streek en een Historische Plaats, welke sleechts Weinigen Kennen Spade en Waker Voldoende voor Concessie Beklimming van Kolossalen Steen Muur.*
- J. Donald Hughes. (2016). *What is Environmental History* (2 ed.). Polity Press.
- Java-bode : nieuws, handels-en advertentieblad voor N.-I. (1951, Februari 26). *Houtdiefstallen.*
- Kartodirjo, S. (2017). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Margana, S. (1997). Kapitalisme Pribumi dan Sistem Agraria Tradisional: Perkebunan Kopi di Mangkunegaran 1853-1881. *Lembaran Sejarah*, 1(2), 72–103.
- McNeill, J. R. (2003). Observations on the Nature and Culture of Environmental History. *History and Theory*, 42(4), 5–43. <https://doi.org/10.1046/j.1468-2303.2003.00255.x>

- Nederlandsch-Indië, H. nieuws van den dag voor. (1935, Mei). *Bandjir in Wonogiri*.
- Nieuwe Tilbursche courant. (1914, Desember 24). *Kolonien. Overstoomingen op Midden Java*.
- Omgeving van Pradjimantoro bij Wonogiri (1941).
- Pradita, D., W, A. P. S., Fathonah, M., Siti Rhohana, Hany Nur Pratiwi, Afriani Nur Hastuti, Tony Prasetyo, & Efel Indhurian. (2021). *Onderneming Mento Toelakan Dinamika Perkebunan Serat di Pinggiran Wonogiri 1897-1996* (A. P. Surya & Dennys Pradita (Ed.)). Lakheisha.
- Pradita, D., & Wardhana, A. P. S. (2023). The Landscape Changes in Mento Toelakan Plantation, 1863-1950s. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.37888>
- Preangerbode, A. I. dagblad : de. (1956, Februari). *Tijgerplaag in Wonogiri*.
- Primaditya, K. T., & Saraswati, I. (2022). Pengaruh Kekuasaan terhadap Perubahan Lahan Hutan di Surakarta Tahun 1900-1998. *KERATON : Journal of History Education and Culture Vol.*, 4(1). <https://doi.org/10.32585/keraton.v1i1>
- Rivier bij Wonogiri, Midden-Java (1915).
- Sari, S. A. M., & Agung, D. A. G. (2023). Pengelolaan hutan jati pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di Ngandjoek Tahun 1927- 1942. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 3(3).
- Sriyono. (2006). *Sejarah Terjadinya Pemerintahan di Wonogiri*. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Surakarta Kruidnagel-aanplant in Wonogiri*. (1953, Januari).
- Warto. (2017). Hutan Jati Berkalung Besi: Pengangkutan Kayu Jati di Jawa pada Akhir Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20. *SASDAYA, Gadjah Mada Journal of Humanities*, 1(2).
- Wasino. (2005). Mangkunegara IV, Raja-Penguasa Pendiri Industri Gula Mangkunegaran (1861-1881). *Humaniora*, 17(1).
- Witasari, N. (2017). Antara Kemanfaatan dan Keseimbangan: Mangkunegara VII dan Pengelolaan Hutan Mangkunegaran. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), 84. <https://doi.org/10.14710/jscl.v2i2.15398>
- Witasari, N., Julian, N. J. U., & Oktaviani, D. A. (2023). Kehutanan dalam Literasi Lisan Jawa: Sebuah Tinjauan Sejarah Kehutanan Mangkunegaran. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/isnad.v4i02.7497>
- Worster, D. (1993). *The Wealt of Nature*. Oxford University Press.